

**EDUKASI KLASIFIKASI DISABILITAS BAGI MASYARAKAT DAN  
APARATUR SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN LAYANAN INKLUSIF**

**Muh. Rijal<sup>1)</sup> Rosita Hidiya<sup>2)</sup> Yusra Sumarni Djafar<sup>3)</sup> Apriyani Melani Putri<sup>4)</sup> Moh.  
Juanda Wadipalapa<sup>5)</sup>**

<sup>1,2,3,4,5)</sup> Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email: [muh.rijal@ubmg.ac.id](mailto:muh.rijal@ubmg.ac.id) [hidiya.shinta@gmail.com](mailto:hidiya.shinta@gmail.com) [yusrasdjafar12@gmail.com](mailto:yusrasdjafar12@gmail.com)  
[apriyanimelani25@gmail.com](mailto:apriyanimelani25@gmail.com) [mohjuanda23@gmail.com](mailto:mohjuanda23@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Persons with disabilities continue to face various barriers in accessing inclusive public services due to the limited understanding of communities and local government officials regarding disability classification, as well as persistent social stigma toward people with disabilities. This community service program aimed to improve the understanding of the Pauwo Village community and local officials regarding types of disabilities, principles of inclusive public services, and the importance of disability data collection as a foundation for developing responsive and equitable services. The program was conducted on October 30, 2025, in Pauwo Village, Kabila District, Bone Bolango Regency, involving 26 participants consisting of village officials and community members. The implementation employed an andragogical approach through lectures and participatory discussions. The results demonstrated an increase in participants' understanding of physical, sensory, intellectual, mental disabilities, and autism, as well as greater awareness of the importance of non-discriminatory, accessible, and dignity-based public services for persons with disabilities. In addition, the program successfully fostered collective awareness to reduce social stigma toward persons with disabilities and strengthened the capacity of local officials in conducting community-based disability data collection. This community service activity contributed positively to the development of more responsive, humane, and sustainable inclusive public services in Pauwo Village.*

**Keywords:** *disability; inclusive public services; community education; disability data collection; social stigma*

**ABSTRAK**

Disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh layanan publik yang inklusif akibat rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur mengenai klasifikasi disabilitas serta masih kuatnya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur Kelurahan Pauwo mengenai ragam disabilitas, prinsip layanan publik inklusif, serta pentingnya pendataan disabilitas sebagai dasar pengembangan layanan yang responsif dan berkeadilan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan melibatkan 26 peserta yang terdiri atas aparatur kelurahan dan masyarakat umum. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan andragogi melalui metode ceramah dan diskusi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait klasifikasi disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental, dan autisme, serta meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya layanan publik yang nondiskriminatif, aksesibel, dan menghormati martabat penyandang disabilitas. Selain itu, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk mengurangi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas serta memperkuat kapasitas aparatur dalam pendataan disabilitas berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian ini memberikan

kontribusi positif dalam mendukung pengembangan layanan publik inklusif yang lebih responsif, humanis, dan berkelanjutan di Kelurahan Pauwo.

**Kata kunci:** disabilitas; layanan publik inklusif; edukasi masyarakat; pendataan disabilitas; stigma sosial

## PENDAHULUAN

Disabilitas merupakan salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia yang masih menghadapi berbagai ketidaksetaraan, setelah diskriminasi etnis dan ras, dan persoalan ini diakui secara luas sebagai masalah signifikan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen pembangunan [1]. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas secara tegas mendefinisikan disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak [2]. Meskipun regulasi tersebut telah diberlakukan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas (CRPD), implementasi prinsip-prinsip inklusi di tingkat akar rumput masih menghadapi berbagai kendala yang cukup fundamental [3]. Isu disabilitas sejatinya tidak hanya berkaitan dengan permasalahan kesehatan semata, melainkan juga dengan kondisi fisik dan lingkungan sosial tempat disabilitas mengalami keterbatasan dalam partisipasi sosial sepanjang hidupnya [4]. Disabilitas dalam kehidupan nyata kerap tidak tampak di tengah masyarakat karena sering dianggap sebagai kelompok yang tidak dapat beraktivitas normal seperti masyarakat pada umumnya, dan anggapan inilah yang kemudian melahirkan stigma sosial yang mengakar [2]. Kurangnya koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintah pada berbagai tingkatan turut menghambat harmonisasi pendekatan dalam mewujudkan layanan yang berpihak pada penyandang disabilitas, sementara terminologi terkait disabilitas yang tidak konsisten antar kementerian memperlemah fondasi implementasi kebijakan [5]. Semakin besar peran pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, semakin besar pula peluang terwujudnya kehidupan yang setara, namun di negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan disabilitas belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional secara menyeluruh. Kondisi ini menegaskan bahwa diperlukan intervensi yang terencana, berbasis komunitas, dan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan mendasar ini secara sistemik dan komprehensif.

Pemahaman yang akurat mengenai klasifikasi dan ragam disabilitas merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam membangun layanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ragam disabilitas meliputi empat kategori utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan layanan yang berbeda, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, maupun multi dalam jangka waktu paling singkat enam bulan atau bersifat permanen. Disabilitas fisik mencakup terganggunya fungsi gerak seperti amputasi, lumpuh layu, paraplegi, dan cerebral palsy; disabilitas intelektual merujuk pada

gangguan fungsi pikir seperti lambat belajar dan down syndrome; disabilitas mental meliputi gangguan psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, autisme, dan hiperaktif; sementara disabilitas sensorik mencakup hambatan pada fungsi panca indera seperti disabilitas netra, rungu, dan wicara. Secara khusus, anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) menunjukkan variasi perkembangan yang luas pada berbagai aspek, meliputi motorik, bahasa, perhatian, dan kemampuan sosial-emosional, sehingga memerlukan layanan yang tidak bersifat seragam melainkan responsif terhadap kebutuhan perkembangan masing-masing individu [6]. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai profil perkembangan dan kebutuhan spesifik setiap ragam disabilitas, layanan yang diberikan berisiko tidak sesuai sasaran dan kurang memberikan dampak yang optimal bagi kehidupan disabilitas[7]. Ketidapahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap keberagaman ini sering kali memicu kesalahan persepsi, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak tepat terhadap disabilitasdalam berbagai konteks kehidupan. Disabilitasadalah kelompok yang beragam dan kemampuan mereka untuk berfungsi dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi disabilitas serta hambatan lingkungan yang melingkupinya, sehingga pendekatan layanan yang generik tidak akan mampu menjawab kebutuhan yang sesungguhnya [8]. Oleh karena itu, edukasi mengenai klasifikasi dan ragam disabilitas kepada masyarakat dan aparaturnya pemerintahan menjadi langkah yang sangat mendesak, strategis, dan bernilai tinggi untuk dilaksanakan.

Stigma sosial terhadap disabilitas merupakan hambatan struktural yang paling mengakar dan paling sulit dieliminasi dalam perjalanan menuju inklusivitas yang sesungguhnya di berbagai sektor kehidupan. Stigmatisasi merupakan suatu proses sosial ketika seseorang yang terpinggirkan telah diberi label sebagai orang yang abnormal atau sesuatu yang memalukan, dan stigma ini menjadi label negatif yang lahir dari lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan, dan kehidupan bermasyarakat. Stigma muncul ketika pelabelan, stereotip, dan prasangka menyebabkan hilangnya status serta diskriminasi bagi individu, baik dalam bentuk stigma publik (enacted stigma) maupun stigma diri sendiri (self-stigma), dan dampak psikologisnya sangat serius karena disabilitaskerap mengalami rendah diri hingga mengisolasi dirinya dari lingkungan sosial [4]. Masyarakat cenderung memunculkan prasangka bahwa keterbatasan fisik disabilitasberbanding lurus dengan tingkat intelektualitasnya, sehingga mereka dianggap tidak mampu berkontribusi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dunia kerja dan layanan publik. Diskriminasi yang bersumber dari prasangka ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi langsung, diskriminasi tidak langsung, hingga pelecehan di tempat kerja, dan kondisi ini bahkan dianggap sebagai pemicu stres yang menyebabkan respons fisik seperti tekanan darah tinggi serta perburukan kesehatan secara keseluruhan [8]. Upaya pengurangan stigma melalui edukasi terstruktur dan kampanye kesadaran kolektif menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda, khususnya di tingkat komunitas dan unit pemerintahan terkecil seperti kelurahan yang berinteraksi langsung dengan disabilitassetiap harinya.

Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memegang

peranan strategis dalam memastikan kebijakan inklusi disabilitas dapat berjalan efektif di tingkat grassroots, namun kapasitas aparaturnya untuk mendukung peran tersebut masih sangat terbatas. Aparatur kelurahan yang berinteraksi langsung dengan warga setiap harinya memiliki posisi kunci sebagai fasilitator, pengambil keputusan, dan pelaksana layanan publik yang menyentuh kehidupan nyata penyandang disabilitas, namun keterbatasan pengetahuan mereka tentang ragam disabilitas menyebabkan layanan yang diberikan sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Penanganan permasalahan disabilitas memang telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan belas kasihan ke arah yang lebih mengutamakan pemenuhan hak, namun pergeseran paradigma ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik layanan di tingkat kelurahan dan desa. Program-program pengabdian terdahulu yang menyasar disabilitas sebagai penerima manfaat masih belum banyak yang berfokus pada pemenuhan hak disabilitas dalam bidang pendataan dan edukasi klasifikasi sebagai dasar layanan inklusif di tingkat komunitas. Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, struktur sosial yang solid meliputi RT/RW, kelompok PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat sesungguhnya merupakan potensi besar yang dapat dimobilisasi untuk membangun ekosistem layanan inklusif apabila kapasitasnya diperkuat melalui edukasi yang terstruktur. Penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui kegiatan edukasi klasifikasi disabilitas yang sistematis menjadi langkah awal yang sangat menentukan bagi terwujudnya perubahan yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

Pendataan disabilitas yang akurat, terintegrasi, dan berbasis komunitas merupakan elemen kunci yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan layanan publik inklusif yang efektif dan tepat sasaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu hak disabilitas adalah hak atas pendataan, dan pendataan itu sendiri memiliki fungsi untuk mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi disabilitas sekaligus membantu perumusan dan implementasi kebijakan [9]. Terdapat tiga tujuan utama pengumpulan dan analisis data disabilitas, yaitu memantau tingkat functioning dalam masyarakat, merancang layanan yang dibutuhkan, serta memastikan semua penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk berfungsi secara optimal dan dapat dijadikan masukan bagi pengembangan lingkungan yang kondusif [10]. Namun, implementasi pendataan disabilitas di berbagai daerah di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, terutama pada tingkat desa dan kelurahan, di mana pendataan yang tidak menyeluruh dan tidak spesifik berdampak pada implementasi kebijakan serta program bantuan yang menjadi tidak optimal dan belum menyentuh seluruh lapisan keberagaman disabilitas. Kondisi ini sangat relevan dengan situasi di Kelurahan Pauwo, di mana peran RT/RW sebagai garda terdepan dalam proses identifikasi dan pendataan disabilitas belum dimaksimalkan akibat keterbatasan pengetahuan mengenai klasifikasi disabilitas dan instrumen pendataan yang tepat. Data yang dihimpun melalui pendataan yang komprehensif dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan disabilitas di kelurahan, termasuk identitas disabilitas dan potensi atau kemampuan mereka, yang pada akhirnya menjadi fondasi

terwujudnya kelurahan inklusif yang berkelanjutan

Layanan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai tentang profil dan klasifikasi disabilitas berpotensi kurang relevan dan tidak mampu menjawab kebutuhan nyata [11]. Kolaborasi dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal terbukti menjadi kunci keberhasilan program berbasis edukasi dalam mewujudkan ekosistem inklusif yang sistemik dan tidak hanya bersifat sementara, karena pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan, edukasi, dan advokasi menghasilkan perubahan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan [3]. Penanganan diskriminasi dan stigma, upaya sosialisasi yang komprehensif yang melibatkan masyarakat hingga pemerintah terbukti mampu menciptakan lingkungan yang lebih bebas dari stigma, sejalan dengan rekomendasi bahwa kampanye kesadaran perlu terus dilakukan untuk menghilangkan stereotip tentang penyandang disabilitas. Peningkatan peran pemerintah dalam menghubungkan berbagai pihak, memperluas jangkauan edukasi, dan membangun database disabilitas yang komprehensif merupakan rekomendasi yang mengemuka dari berbagai studi, dan kegiatan pengabdian berbasis edukasi klasifikasi disabilitas menjadi salah satu modalitas intervensi yang paling feasible untuk diwujudkan di tingkat kelurahan. Pendekatan edukasi yang menekankan pada pemberian informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai disabilitas terbukti meningkatkan kesadaran dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari para pelaksana layanan publik di tingkat komunitas.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk "Edukasi Klasifikasi Disabilitas bagi Masyarakat dan Aparatur sebagai Dasar Pengembangan Layanan Inklusif" di Kelurahan Pauwo dirancang sebagai respons ilmiah dan praktis yang terstruktur atas kesenjangan kapasitas yang telah teridentifikasi secara komprehensif dari berbagai sumber empiris. Kegiatan ini secara khusus menyasar tiga permasalahan utama yang saling berkaitan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur Kelurahan Pauwo mengenai klasifikasi dan ragam disabilitas, rendahnya praktik layanan publik inklusif akibat minimnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip layanan yang menghormati hak dan martabat penyandang disabilitas, serta masih kuatnya stigma dan persepsi keliru terkait disabilitas yang menghambat terwujudnya inklusi sosial yang sesungguhnya. Tujuan kegiatan ini mencakup tiga dimensi yang saling memperkuat, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur mengenai ragam dan karakteristik disabilitas termasuk profil perkembangan spesifik seperti autisme; mendorong penerapan layanan publik inklusif berdasarkan prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan penghormatan martabat; serta mengurangi stigma masyarakat terhadap disabilitas melalui edukasi berbasis pengetahuan ilmiah yang sistematis. Sasaran utama kegiatan ini mencakup aparatur kelurahan termasuk lurah, staf administrasi, RT/RW, dan petugas layanan publik, serta masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, karena penguatan kapasitas kedua kelompok ini secara bersamaan akan memberikan dampak yang lebih luas dan lebih berkelanjutan. Dengan memperkuat pemahaman RT/RW sebagai garda terdepan dalam proses identifikasi dan pendataan, diharapkan data

disabilitas di Kelurahan Pauwo dapat menjadi lebih akurat, lengkap, dan dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perencanaan program yang tepat sasaran, sejalan dengan mandat UU No. 8 Tahun 2016 yang menegaskan pendataan sebagai hak penyandang. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa disabilitas adalah bagian integral dari keberagaman masyarakat yang wajib dihargai, dilibatkan, dan dilayani secara setara dalam setiap aspek kehidupan publik. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen komunitas dan didasarkan pada model edukasi yang telah terbukti efektif dalam berbagai konteks serupa, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perubahan sikap, memperbaiki proses pendataan, dan membangun kerja sama kelembagaan yang solid antara kelurahan, TKSK, puskesmas, serta organisasi sosial yang relevan. Pada akhirnya, kegiatan pengabdian ini diharapkan menjadi pijakan strategis bagi penguatan layanan publik inklusif yang berkelanjutan di Kelurahan Pauwo sekaligus berkontribusi pada agenda pembangunan inklusif yang lebih luas di tingkat kabupaten dan provinsi, sejalan dengan visi pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun, termasuk disabilitas dalam seluruh ragam dan keberagamannya.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 bertempat di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diikuti oleh 26 orang peserta yang terdiri dari 6 aparatur kelurahan dan 20 orang masyarakat umum yang merepresentasikan berbagai elemen komunitas di Kelurahan Pauwo. Penetapan sasaran peserta didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa aparatur kelurahan dan masyarakat merupakan dua kelompok yang paling langsung berinteraksi dengan disabilitas dalam konteks pelayanan publik dan kehidupan sosial sehari-hari. Aparatur kelurahan yang menjadi peserta mencakup lurah, staf administrasi, serta perwakilan RT/RW yang memiliki peran kunci dalam proses identifikasi, pendataan, dan pemberian layanan kepada disabilitas di lingkungan kelurahan. Adapun peserta dari unsur masyarakat meliputi tokoh masyarakat, anggota kelompok PKK, perwakilan karang taruna, serta warga umum yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kelurahan Pauwo. Komposisi peserta yang beragam ini dirancang secara purposif untuk memastikan bahwa edukasi klasifikasi disabilitas dapat menjangkau seluruh lapisan komunitas yang memiliki peran dalam mendorong terwujudnya layanan publik inklusif di tingkat kelurahan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan interaktif, di mana peserta terlibat aktif dalam sesi pemaparan materi, diskusi kelompok, dan tanya jawab terkait klasifikasi disabilitas serta prinsip penerapan layanan publik inklusif di Kelurahan Pauwo. Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung mencerminkan adanya kebutuhan nyata akan edukasi semacam ini di tingkat komunitas, sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam tahap analisis situasi sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan andragogi, yaitu pendekatan pembelajaran bagi orang dewasa yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif yang membawa pengalaman, pengetahuan, dan kapasitas berpikir

Submit: Juli. 20<sup>th</sup>, 2025

Accepted: Agustus 22<sup>th</sup>, 2025

Published: September 29<sup>th</sup>, 2025

Journal of Hulanthalo Service Society (JHSS) E-ISSN: 2964-9250

kritis dalam proses belajar, sehingga proses edukasi yang berlangsung bersifat dialogis dan partisipatif [1]. Pendekatan ini dipilih karena peserta kegiatan merupakan aparatur kelurahan dan masyarakat dewasa yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan tingkat pemahaman awal yang beragam terkait isu disabilitas, sehingga metode yang diterapkan perlu mampu mengakomodasi keberagaman tersebut secara fleksibel dan responsif. Secara teknis, pelaksanaan kegiatan mengintegrasikan dua metode utama yang saling melengkapi, yaitu metode ceramah dan metode diskusi partisipatif, yang keduanya dirancang untuk mengoptimalkan penyerapan materi sesuai dengan kemampuan dan daya serap masing-masing peserta.

Metode ceramah diterapkan pada sesi pemaparan materi inti oleh narasumber, di mana informasi mengenai klasifikasi disabilitas, prinsip layanan inklusif, dan mekanisme pendataan disampaikan secara sistematis, terstruktur, dan didukung oleh media visual berupa slide presentasi yang dirancang dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Penyampaian materi melalui metode ceramah ini diupayakan untuk tidak bersifat satu arah semata, melainkan secara aktif diselingi oleh pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mendorong peserta untuk berpikir kritis dan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata mereka dalam berinteraksi dengan disabilitas di lingkungan kelurahan. Metode diskusi partisipatif diterapkan sebagai kelanjutan dari sesi ceramah, di mana peserta diberi ruang yang luas untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas, serta merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan setelah kegiatan ini berakhir. Dinamika diskusi yang berlangsung selama sesi tanya jawab memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan antarpeserta yang memperkaya pemahaman kolektif mengenai ragam disabilitas dan praktik layanan inklusif yang humanis dan bermartabat.

Seluruh rangkaian metode pelaksanaan tersebut dirancang berdasarkan prinsip bahwa peningkatan pemahaman yang bermakna tidak hanya terjadi melalui transfer informasi satu arah, tetapi juga melalui proses refleksi, dialog, dan konstruksi pengetahuan bersama yang melibatkan seluruh peserta secara aktif [3]. Dengan memadukan pendekatan andragogi, metode ceramah yang kontekstual, dan diskusi partisipatif yang reflektif, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang untuk mewujudkan Kelurahan Pauwo sebagai lingkungan yang inklusif, ramah disabilitas, dan berpusat pada penghormatan hak setiap warganya tanpa terkecuali.

## **HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pelaksanaan**

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini tercermin dari tingginya antusiasme seluruh pemangku kepentingan yang hadir, baik dari unsur aparatur kelurahan maupun masyarakat umum Kelurahan Pauwo. Kegiatan yang diikuti oleh 26 peserta, terdiri dari 6 aparatur kelurahan dan 20 orang masyarakat, berlangsung dengan baik, kondusif, dan sangat interaktif sepanjang rangkaian acara dari awal hingga akhir. Tingginya partisipasi peserta mencerminkan adanya kebutuhan nyata akan edukasi terkait disabilitas di tingkat komunitas, sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam tahap analisis

Submit: Juli. 20<sup>th</sup>, 2025

Accepted: Agustus 22<sup>th</sup>, 2025

Published: September 29<sup>th</sup>, 2025

Journal of Hulanthalo Service Society (JHSS) E-ISSN: 2964-9250

situasi sebelum pelaksanaan kegiatan ini. Peserta memberikan respons yang sangat positif selama proses penyampaian materi, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab terkait klasifikasi disabilitas serta penerapan layanan publik inklusif di lingkungan Kelurahan Pauwo. Dinamika interaksi antara narasumber dan peserta yang berlangsung secara dua arah menunjukkan bahwa metode ceramah partisipatif yang dikombinasikan dengan diskusi terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif peserta dan memfasilitasi proses konstruksi pengetahuan bersama. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan empat capaian utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sebagai fondasi pengembangan layanan publik inklusif di Kelurahan Pauwo, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam sub-sub bagian berikut ini.



Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi dan Diskusi terkait Keragaman Disabilitas

Salah satu hasil paling signifikan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah terjadinya peningkatan pengetahuan dan kompetensi peserta yang terukur terkait klasifikasi dan ragam disabilitas, yang sebelumnya masih sangat terbatas di kalangan aparatur kelurahan maupun masyarakat Pauwo. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung memandang disabilitas secara reduktif sebagai kondisi medis atau kekurangan personal semata, tanpa memahami keberagaman ragam, karakteristik, dan kebutuhan layanan yang berbeda pada setiap jenis disabilitas.

Selain peningkatan pemahaman mengenai klasifikasi disabilitas, kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan peningkatan pengetahuan peserta yang signifikan mengenai pentingnya pendataan disabilitas sebagai instrumen dasar dalam pengembangan program dan layanan kelurahan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Melalui penyampaian materi pendataan disabilitas yang menekankan urgensi akurasi, keberlanjutan, dan pemanfaatan data untuk merancang layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan yang responsif, aparatur kelurahan menyadari bahwa pendataan berbasis RT/RW selama ini belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, sehingga berdampak pada ketidaktepatan sasaran berbagai program yang telah dijalankan. Prinsip-prinsip tersebut dipahami oleh peserta sebagai fondasi etis dan legal yang tidak dapat diabaikan dalam memberikan pelayanan publik yang tidak merendahkan, tidak menolak, dan secara aktif

membuka akses layanan yang setara bagi seluruh warga termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana diamanatkan secara tegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemahaman tersebut semakin diperkuat oleh teori equity-based public service yang menjelaskan bahwa pelayanan publik yang adil bukan berarti memberikan perlakuan yang identik kepada semua orang, melainkan memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing individu sesuai kondisi dan karakteristiknya. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang holistik dan terintegrasi bahwa pendataan yang baik dan penerapan prinsip layanan inklusif adalah dua aspek yang saling terkait secara organik dan menjadi dasar yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan, bermartabat, dan berkelanjutan di Kelurahan Pauwo.

membangun kesadaran kolektif yang bermakna di kalangan masyarakat dan aparaturnya Kelurahan Pauwo dalam upaya mengurangi stigma sosial terhadap disabilitas yang selama ini menjadi hambatan struktural paling mendasar bagi terwujudnya inklusi yang sesungguhnya. Melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif yang berlangsung secara terbuka dan reflektif, peserta mulai memahami secara mendalam bahwa disabilitas merupakan bagian integral dari keberagaman manusia, bukan sesuatu yang bersifat "cacat", "memalukan", atau kekurangan personal yang patut disembunyikan, sebagaimana ditekankan dalam materi mengenai prinsip inklusivitas dan penerimaan keberagaman manusia yang disampaikan dalam kegiatan ini. Pemahaman ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mengubah cara pandang masyarakat secara fundamental, di mana sebelumnya disabilitas sering kali dipersepsikan sebagai kelompok yang terbatas, tidak mampu berkontribusi, dan menjadi beban sosial yang harus ditanggung oleh keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Stigmatisasi yang selama ini terjadi merupakan proses sosial yang melabeli disabilitas sebagai orang yang abnormal atau memalukan, dan label negatif ini lahir dari lingkungan yang dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan, serta kehidupan bermasyarakat yang belum terpapar edukasi yang memadai tentang keberagaman manusia.

Setelah mengikuti kegiatan edukasi ini, banyak peserta menyadari bahwa hambatan yang dialami disabilitas dalam kehidupan sehari-hari bukan semata-mata berasal dari kondisi tubuh atau kemampuannya, melainkan sangat ditentukan oleh lingkungan, kualitas pelayanan, dan sikap sosial masyarakat di sekitarnya yang belum inklusif dan belum ramah terhadap keberagaman. Perspektif perubahan ini sepenuhnya sejalan dengan *Social Model of Disability* yang menegaskan bahwa faktor lingkungan dan sosial seringkali menjadi penghalang utama bagi disabilitas dalam berpartisipasi penuh dalam masyarakat, dan oleh karena itu, solusi atas persoalan disabilitas harus diarahkan pada transformasi lingkungan dan sikap sosial, bukan pada upaya "memperbaiki" kondisi individu disabilitas itu sendiri. Perubahan persepsi yang mulai terjadi di kalangan peserta ini secara langsung berkontribusi pada tumbuhnya empati, penerimaan yang lebih tulus, dan kesiapan yang lebih konkret untuk mendukung disabilitas dalam kehidupan sosial di Kelurahan Pauwo, yang pada gilirannya akan menciptakan kondisi sosial yang lebih inklusif, aman, dan bermartabat bagi seluruh warganya. Peningkatan kesadaran kolektif ini merupakan salah satu dampak paling berharga dari kegiatan edukasi berbasis komunitas, karena perubahan

sikap sosial yang terjadi secara kolektif akan jauh lebih berpengaruh dan lebih tahan lama dibandingkan perubahan yang hanya terjadi pada level individu secara terisolasi.

### **Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Pauwo secara keseluruhan menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas mengenai klasifikasi disabilitas dan pelayanan publik inklusif memberikan dampak yang signifikan, multidimensi, dan saling memperkuat terhadap pemahaman, kapasitas, dan sikap peserta dalam konteks penanganan isu disabilitas di tingkat kelurahan. Temuan ini selaras dengan hasil berbagai program pengabdian serupa yang telah dilaksanakan di konteks yang berbeda, yang secara konsisten menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang terstruktur, partisipatif, dan kontekstual mampu menghasilkan perubahan yang bermakna dalam waktu yang relatif singkat [1], [3]. Peningkatan pengetahuan peserta mengenai ragam disabilitas, baik fisik, sensorik, intelektual, mental, maupun autisme, memberikan landasan kognitif yang kokoh bagi peserta untuk memahami bahwa setiap jenis disabilitas memiliki kebutuhan layanan yang tidak dapat disamaratakan dan memerlukan pendekatan yang terdiferensiasi sesuai karakteristik masing-masing individu.

Kegiatan ini juga berhasil memperkuat pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip layanan publik inklusif sebagai kerangka normatif yang harus menjadi acuan dalam setiap aspek penyelenggaraan layanan di tingkat kelurahan. Penguatan pemahaman mengenai prinsip nondiskriminasi, aksesibilitas, penghormatan martabat, dan penyesuaian wajar menjadi sangat relevan mengingat temuan berbagai studi yang menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap disabilitas masih terjadi secara meluas di berbagai sektor, termasuk dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan ketenagakerjaan [4], [8]. Penerapan teori equity-based public service yang menekankan penyesuaian layanan berdasarkan kebutuhan spesifik individu, bukan keseragaman perlakuan, memberikan kerangka konseptual yang operasional bagi aparatur kelurahan dalam memahami dan menginternalisasi mengapa layanan inklusif secara esensial berbeda dari layanan publik konvensional yang selama ini diterapkan [9].

Dampak kegiatan ini terhadap peningkatan kapasitas aparatur dalam pendataan disabilitas juga merupakan temuan yang sangat penting dan strategis, mengingat kelemahan sistem pendataan di tingkat komunitas telah terbukti menjadi salah satu hambatan utama yang menghalangi terwujudnya layanan inklusif yang efektif dan tepat sasaran. Kondisi yang sama sangat relevan dengan konteks Kelurahan Pauwo, di mana pendataan disabilitas selama ini belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, sehingga peningkatan kapasitas aparatur dan RT/RW dalam memahami mekanisme dan urgensi pendataan yang benar menjadi salah satu kontribusi paling strategis dari kegiatan pengabdian ini. Data yang valid dan komprehensif yang dihasilkan dari pendataan berbasis rumah tangga oleh RT/RW tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat perencanaan kebijakan yang memungkinkan kelurahan untuk mengembangkan program-program yang benar-benar menyentuh kehidupan nyata disabilitas dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Kegiatan edukasi mengenai klasifikasi disabilitas berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat dan aparatur kelurahan terkait ragam hambatan disabilitas, meliputi hambatan fisik, sensori, intelektual, mental, dan autisme. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman bahwa disabilitas merupakan bagian dari keberagaman manusia yang memerlukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip layanan publik inklusif, seperti nondiskriminasi, aksesibilitas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penyesuaian yang layak, sehingga memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur dalam mewujudkan pelayanan yang lebih responsif, humanis, dan inklusif. Kegiatan ini turut mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas, yang ditunjukkan melalui perubahan persepsi menjadi lebih positif, empatik, dan terbuka setelah mengikuti kegiatan edukasi dan diskusi. Lebih lanjut, pengabdian ini menghasilkan komitmen bersama antara aparatur kelurahan, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial dalam mendukung implementasi layanan publik inklusif serta penguatan pendataan penyandang disabilitas secara berkelanjutan di Kelurahan Pauwo.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perangkat Kelurahan Pauwo atas dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Edukasi Klasifikasi Disabilitas bagi Masyarakat dan Aparatur sebagai Dasar Pengembangan Layanan Inklusif.” Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Pauwo yang telah berpartisipasi secara antusias dalam kegiatan edukasi, diskusi, dan berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Dukungan dan keterlibatan seluruh pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sehingga tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai disabilitas dan pengembangan layanan publik yang inklusif dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- [1] N. Asmiati, A. Al Atsari, R. S. Anugrah, F. A. Az-zahra, and E. Bai, “Edukasi Pendataan Disabilitas sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pemerataan Hak Warga Disabilitas di Desa Pasanggrahan,” *Arch. J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 260–267, 2025.
- [2] K. E. Marsitadewi, “Analisis Peran Pemerintah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas,” *JPAP J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 239–252, 2022, doi: 10.30996/jpap.v8i2.7345.
- [3] F. T. Eldiva and R. R. Fitra, “Peningkatan Aksesibilitas dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Melalui Program Edukasi dan Pelatihan Inklusif,” *JPPKh Lect. J. Pengabdi. Pendidik. Khusus*, vol. 3, no. 1, pp. 29–36, 2025, [Online]. Available: <https://journal.unilak.ac.id/index.php/JPPKhLectura/article/view/27352>

- [4] K. Mulyani, M. Sahrul, and A. Ramdoni, "Ragam diskriminasi penyandang disabilitas fisik tunggal dalam dunia kerja," *Khidm. Sos. J. Soc. Work Soc. Serv.*, vol. 3, no. 1, pp. 11–20, 2022.
- [5] UNICEF Indonesia, *Memberdayakan Setiap Anak Merangkul Keanekaragaman dan Inklusi untuk semua: Analisis Lanskap tentang Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2023. [Online]. Available: <https://www.unicef.org/indonesia/id/disabilitas/laporan/analisis-lanskap-anak-dengan-disabilitas-di-indonesia>
- [6] M. Rijal and R. Hidiya, "Profil Perkembangan Anak Autism Spectrum Disorder dan Implikasinya terhadap Layanan Konseling," *J. Pendidik. Sos. dan Konselin*, vol. 3, no. 4, pp. 553–558, 2026.
- [7] M. Rijal, Mumpuniarti, and M. A. A.M, "Integrating Gestalt Theory Concepts in Visual Perception Assessment for Children with Intellectual Disabilities," *J. Educ. Res. Eval.*, vol. 8, no. 2, pp. 328–337, 2024, doi: 10.23887/jere.v8i2.69127.
- [8] Z. A. Sekarini and H. Inawan, "Deskriptif Literatur Review Diskriminasi Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja," *J. Ilm. Nusantara*, vol. 1, no. 5, pp. 37–44, 2024.
- [9] B. Martua, V. Sinaga, C. K. Sianturi, D. Gunawan, R. B. Tarigan, and S. M. B. Panjaitan, "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak-Hak Disabilitas Melalui Mini Project Ramah Disabilitas," *J. Pengabd. Masy. Bid. Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 3, pp. 240–246, 2023, doi: 10.55123/abdisoshum.v2i3.1447.
- [10] Y. Suvita, T. I. B. Manullang, S. Sunardi, and M. Supriatna, "Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif," *J. Pendidik. Kebutuhan Khusus*, vol. 6, no. 2, pp. 155–164, 2022, doi: 10.24036/jpkk.v6i2.601.
- [11] E. Ediyanto, W. D. Hastuti, and N. A. Rizqianti, "Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi," *Yayasan Pus. Pendidik. Angstrom*, vol. 1, no. 1, pp. 1–63, 2021, doi: <https://educationcenter.id/ace-press/index.php/ojs/article/view/8>.